



KATALOG BPS: 4102002.7315

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

## KABUPATEN PINRANG

# 2011



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG**

## **KATA SAMBUTAN**

Sebagai bahan dan masukan bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan suatu daerah dibutuhkan beragam informasi berupa data statistik yang akurat dan komprehensif, salah satunya adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2010.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* bermanfaat dalam mengukur kinerja pembangunan manusia baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, yang sangat bermanfaat tidak hanya bagi pengambil kebijakan pembangunan, juga bagi aparat pemerintah maupun pihak swasta di Kabupaten Pinrang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini kami ucapkan banyak terima kasih, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi yang nyata pada pembangunan di Kabupaten Pinrang.

Pinrang, Oktober 2011

**BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN PINRANG  
K e p a l a,**

**Ir. H. AMIR MANGOPO, M.P.**

NIP.19530613 198003 1 010

## **KATA PENGANTAR**

Kebutuhan konsumen data akan data statistik semakin kompleks, khususnya data sosial. Untuk memenuhi data tersebut Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang telah menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2010.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Pinrang.

Data yang digunakan untuk menganalisis dua hal tersebut di atas adalah hasil Perhitungan IPM dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, disamping data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi IPM selanjutnya.

Pinrang, Oktober 2011  
BPS KABUPATEN PINRANG,  
Kepala,

**PAULUS MANGANDE, SE**  
NIP. 19640317 199202 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	.....	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Tujuan Penulisan	.....	3
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	.....	4
<b>BAB II. METODOLOGI</b>	.....	5
2.1. Konsep dan Definisi	.....	5
2.2. Metode Penghitungan	.....	9
<b>BAB III. KONDISI WILAYAH</b>	.....	17
3.1. Geografi	.....	17
3.2. Penduduk	.....	18
3.3. Perekonomian	.....	19
<b>BAB IV. KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	.....	22
4.1 <i>Shorfall</i> Pembangunan Manusia	.....	23
4.2 Bidang Kesehatan	.....	25
4.3. Bidang Pendidikan	.....	27

4.3.1	Indeks Pendidikan	.....	28
4.3.2	Angka Melek Huruf	.....	29
4.3.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	.....	31
4.3.4	Fasilitas Pendidikan	.....	31
4.4.	Indeks Daya Beli	.....	34
4.5.	Pengeluaran Rumah Tangga	.....	35
4.6.	Fasilitas Perumahan	.....	36
<b>BAB V.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	.....	41
5.1.	Angkatan Kerja	.....	41
5.2.	Tingkat Pengangguran	.....	42
5.3.	Pendidikan Angkatan Kerja	.....	43
5.4.	Produktifitas Pekerja	.....	43
<b>BAB VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	45
6.1.	Kesimpulan	.....	45
6.2.	Saran	.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Beberapa Indikator Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	21
Tabel 3.2 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang dan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2006-2010.....	21
Tabel 4.1 Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Terdekat Tahun 2006-2010.....	28
Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Kabupaten Pinrang Menurut dan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2006-2010.....	30
Tabel 4.3 Indikator Pendukung Menurut Jenis Indikator Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	38
Tabel 4.4 PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010.....	38
Tabel 4.5 Indikator Pendukung Menurut Jenis Indikator Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	39
Tabel 4.6 PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010.....	40
Tabel 5.1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK di Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	42
Tabel 5.2 Perbandingan Struktur Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010...	43
Tabel 5.3 Angkatan Kerja Menurut Jam Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	44

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	18
Grafik 3.2	Perbandingan PDRB Perkapita Beberapa Kabupaten Pada Tahun 2006-2010.....	20
Grafik 4.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010.....	24
Grafik 4.2	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2006 dan 2010.....	24
Grafik 4.3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	25
Grafik 4.4	Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010.....	29
Grafik 4.5	Angka Melek Huruf Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010.....	30
Grafik 4.6	Daya Tampung Sekolah Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	32
Grafik 4.7	Indeks Paritas Daya Beli Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010....	34
Grafik 4.8	Perbandingan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010.....	36
Grafik 4.9	Sumber Air Bersih Kabupaten Pinrang Tahun 2010.....	37
Grafik 4.10	Sumber Penerangan Listrik Kabupaten Pinrang Tahun 2010.....	37
Grafik 5.1	Penduduk yang Bekerja Dalam Seminggu Tahun 2010 .....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

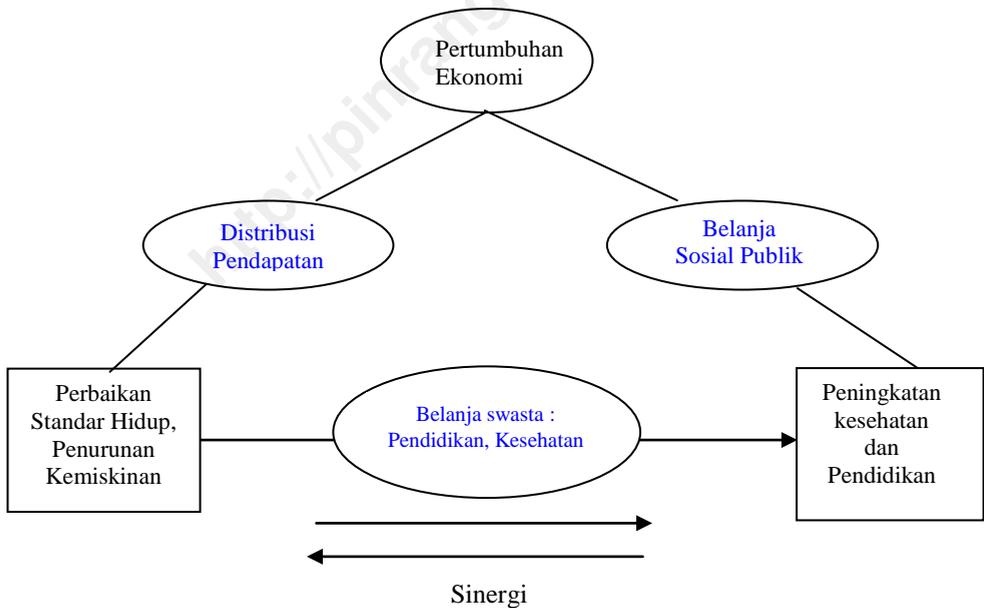
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya diimbangi dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi tersebut apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan, maka hasil pembangunan ekonomi hanya akan dinikmati oleh sekelompok penduduk yaitu penduduk yang bermodal besar. Sehingga pertumbuhan akan kurang berkualitas, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Namun hal yang harus dipahami bahwa untuk mencapai keselarasan kedua factor tersebut dibutuhkan kerja keras oleh semua pihak terutama oleh pemerintah dan juga membutuhkan proses dan waktu yang cukup.

Salah satu isu sehubungan dengan tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia dan hak asasi. Perkembangan pemikiran tentang paradigma pembangunan. Pada dekade 60-an, pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, akan tetapi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang esensial yaitu *human security*. Sehingga, “manusia” tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, akan tetapi sebagai faktor produksi. Kemudian pada dekade 70-an, menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya, pada dekade 80-an, paradigma pembangunan lebih berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic need development*), dan dekade 90-an, terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Berbagai pergeseran kebijaksanaan pembangunan mengakibatkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan perlu disesuaikan. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah terkandung dalam konsep “*basic need development*”. Konsep ini telah mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), dengan parameter; angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

### Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia



**Keterangan :**

Peningkatan produksi (pertumbuhan ekonomi) tidak dapat berjalan sendiri; bergantung pada distribusi pendapatan penduduk dan prioritas belanja pemerintah. Untuk mencapai peningkatan kesehatan dan pendidikan perlu perbaikan standar hidup penduduk yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan tidak kalah pentingnya adanya partisipasi pihak swasta dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Kemudian, paradigma baru pembangunan manusia, *United Nation Development Programme* (UNDP) menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan/ kinerja pembangunan manusia suatu negara/ wilayah.

## **1.2. Tujuan Penulisan.**

Tujuan penulisan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 Kabupaten Pinrang adalah ;

- a Memberikan data dan informasi tentang kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan peningkatan kualitas hidup manusia.
- b Sebagai sumber informasi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
- c Dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dan memonitor program pembangunan yang telah dilakukan, agar prioritas pembangunan dapat ditentukan.

## **1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data**

Ruang lingkup dalam pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang tahun 2010 hanya mencakup wilayah kabupaten.

Cakupan tersebut disebabkan oleh keterbatasan besarnya sampel dan ketersediaan data sekunder.

Sumber data yang dipergunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2006-2010 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pinrang 2006-2010 Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam pelaporan ini akan dibagi beberapa bab/ bagian penulisan, sebagai berikut;

- Bab I **Pendahuluan**; memberikan penjelasan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sumber data serta sistematika penulisan pelaporan.
- Bab II **Metodologi**; menjelaskan tentang konsep/ definisi dan metode perhitungan.
- Bab III **Kondisi Wilayah**; memberikan informasi keadaan geografi dan ekonomi wilayah.
- Bab IV **Kinerja Pembangunan Manusia**; menguraikan pencapaian indeks pembangunan manusia berdasarkan komponen.
- Bab V **Tenaga Kerja**; Memaparkan keadaan tenaga kerja di Kabupaten Pinrang
- Bab VI **Kesimpulan**; memberikan pernyataan hasil-hasil temuan/ diperoleh dalam pelaporan.

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang akan dijelaskan berikut ini merupakan konsep yang telah disepakati dan direkomendasi oleh badan dunia yaitu UNDP. Batasan baku ini diperlukan agar pemahaman tentang suatu indikator atau pengukuran pada suatu masalah mempunyai determinan yang sama. Konsep dan definisi yang dimaksud, sebagai berikut;

- a) Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan angka yang menggambarkan keadaan tentang tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain angka tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan yang bersifat agregat/komposit. komposit artinya dihitung berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (*purchasing power parity*). Berdasarkan rekomendasi UNDP, nilai IPM bernilai 0 (nol) hingga 100. Dimana nilai bergerak mendekati 100 diinterpretasikan sebagai adanya pemberdayaan manusia semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati 0 (nol). Nilai IPM dibawah 50 dikategorikan 'sedang', nilai 51-79 dikategorikan 'menengah' dan di atas 79 dikategorikan 'tinggi'.
- b) Angka harapan hidup penduduk adalah jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang masih hidup. Angka ini mencerminkan status

kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang kesehatan. Perhitungan angka harapan hidup di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tidak langsung, hal ini dilakukan karena registrasi vital penduduk belum berjalan dengan baik. Badan Pusat Statistik menghitung angka harapan hidup menggunakan pendekatan anak lahir hidup dan anak yang masih hidup. Estimasi angka tersebut menggunakan model *West Coale-demeny Trussell equations* (program mortpak-lite).

- c) Angka melek huruf adalah angka yang memberikan informasi tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa/ daerah, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

$$abk = \frac{bbt_{15+}}{pop_{15+}} \times 100\%$$

**Keterangan:**

amh = angka melek huruf orang dewasa

$bbt_{15+}$  = penduduk yang dapat membaca dan menulis berumur 15 tahun ke atas

$pop_{15+}$  = jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

- c) Rata-rata lama bersekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah, semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai.

$$\bar{x}_{ls} = \sum_{i=1}^n \frac{pop_{sek}^i}{pop_i}$$

**Keterangan :**

$\bar{x}_{ls}$  = rata-rata lama bersekolah

$pop_{sek}$  = jumlah tahun bersekolah penduduk

$pop$  = jumlah penduduk

- d) Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi (buruh, kewiraswastaan, modal, dan barang modal) di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan faktor-faktor produksi itu. Jadi PDRB merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto dari setiap sektor kegiatan dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah.

$$pdrb = \sum_{i=1}^9 ntb_i$$

**Keterangan :**

$pdrb$  = produk domestik regional bruto

$ntb_i$  = nilai tambah bruto sektor ke-i

$i$  = sektor kegiatan usaha ke-i,  $i = 1 \dots 9$

- 📖 Nilai tambah bruto adalah nilai manfaat suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi, atau secara sederhana adalah nilai produksi/output dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi/ output (biaya antara).
- 📖 Nilai produksi/ output adalah penilaian atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Biaya antara

adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses penciptaan barang dan jasa dalam suatu periode produksi.

-  Penilaian barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 dan tahun berjalan. Atas dasar harga berlaku adalah penilaian suatu barang dan jasa pada saat terjadinya transaksi atau *current price*, dan dinilai dalam Rupiah. Atas dasar harga konstan adalah penilaian suatu barang dan jasa dengan suatu harga yang tetap. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dengan harga barang dan jasa pada tahun 2000.

$$ntb_i = o_i - ba_i$$

**Keterangan :**

ntb = nilai tambah bruto

O = produksi/output barang dan jasa

ba = biaya antara

i = kegiatan usaha ke-i, i = 1 .. n

-  Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kuantum produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu (dinilai dalam harga konstan).

$$r_{eko} = \frac{pdrb_k^n}{pdrb_k^{n-1}} \times 100\% - 100\%$$

**Keterangan :**

r<sub>eko</sub> = pertumbuhan ekonomi

pdrb<sub>k</sub><sup>n</sup> = pdrb atas dasar harga konstan tahun ke-n

pdrb<sub>k</sub><sup>n-1</sup> = pdrb atas dasar harga konstan tahun ke-n-1

📖 PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

$$pdrb.kapita = \frac{pdrb}{pop_{med}}$$

**Keterangan :**

Pdrb,kapita = pdrb per kapita

pdrb = produk domestik regional bruto

pop<sub>med</sub> = jumlah penduduk pertengahan tahun

- e) Susenas adalah singkatan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan survei rumah tangga tersebut telah dilakukan sejak tahun 1958 hingga kini, format daftar isian telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembangunan di Indonesia. Sejak tahun 1993, ruang lingkungannya diperluas hingga memungkinkan dapat memperkirakan populasi hingga wilayah kabupaten/ kota. Keterangan yang dikumpulkan meliputi keterangan individu/ perorangan dan rumah tangga. Keterangan individu mencakup keterangan pendidikan, kesehatan, fertilitas, tenaga kerja, dan pendapatan upah/gaji. Sedangkan keterangan rumah tangga mencakup keterangan fasilitas perumahan dan pengeluaran rumah tangga.

## 2.2. Metode Perhitungan

Untuk memperoleh angka indeks pembangunan manusia dibutuhkan beberapa proses pengolahan dan perhitingan, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Indeks Pembangunan Manusia, dihitung melalui indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli “*Purchasing Power Parity*” atau PPP. Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut;

$$IMP = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \times 100$$

**Keterangan :**

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$X_1$  = Indeks harapan hidup

$X_2$  = Indeks pendidikan

$X_3$  = Indeks daya beli

- b) Indeks Harapan Hidup, dihitung berdasarkan angka harapan hidup sejak seseorang dilahirkan dengan mempertimbangkan angka harapan hidup terendah dan tertinggi (UNDP). Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut;

$$X_1 = \frac{ahh - 25}{85 - 25} \times 100$$

**Keterangan :**

$X_1$  = Indeks harapan hidup

ahh = angka harapan hidup

25 = nilai terendah

85 = nilai tertinggi

- 📖 Angka Harapan Hidup, dapat dilakukan/ diperoleh melalui suatu paket program Mortpaklite dengan meng-input data hasil susenas rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup hingga refrensi survei per wanita yang berumur 15-49 tahun (kelompok umur lima tahunan). Hasil dari Mortpaklite tersebut tersaji beberapa metode pendekatan, metode yang sesuai dengan keadaan

fertilitas/ mortalitas di Indonesia adalah model *West Coale-demeny Trussell equations*. Kemudian, untuk mendapatkan hasil angka harapan hidup yang lebih baik dirata-ratakan pada kelompok umur 20-35 tahun, demikian pula dengan waktu rujukan “*reference date of life expectancy at birth*”.

- Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*children ever born*), sebagai berikut;

$$Ralh = \frac{\sum_{i=1}^7 alh_i}{\sum_{i=1}^7 w_i}$$

**Keterangan :**

*Ralh* = rata-rata anak lahir hidup

*alh* = anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu ke-*i*

*w* = wanita menurut kelompok umur ke-*i*

*i* = kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34;35-39;40-44;45-49

- Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang masih hidup (*children surviving*), sebagai berikut;

$$Ramsh = \frac{\sum_{i=1}^7 amsh_i}{\sum_{i=1}^7 w_i}$$

**Keterangan :**

*Ramsh* = rata-rata anak yang masih hidup

*amsh* = anak yang masih hidup menurut kelompok umur ibu ke-*i*

*w* = wanita menurut kelompok umur ke-*i*

*i* = kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34;35-39;40-44;45-49

- c) Indeks Pendidikan, dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama bersekolah (baca: konsep/definisi), yang masing-masing besarnya proporsi dua banding satu. Rumus untuk mendapatkan angka tersebut, sebagai berikut;

$$x_2 = \frac{2x_{2.1} + x_{2.2}}{3} \times 100$$

**Keterangan :**

$X_2$  = Indeks pendidikan

$X_{2.1}$  = Indeks melek huruf

$X_{2.2}$  = Indeks rata-rata lama sekolah

- 📖 Indeks Melek Huruf; diperoleh dengan cara membandingkan angka melek huruf hasil perhitungan di suatu daerah tertentu dengan standar UNDP. Rumusnya sebagai berikut;

$$x_{2.1} = \frac{amh - 0}{100 - 0} \times 100$$

**Keterangan :**

$X_{2.1}$  = Indeks melek huruf

amh = angka melek huruf

0 = angka melek huruf terendah

100 = angka melek huruf tertinggi

- 📖 Indeks Rata-rata lama bersekolah, cara memperolehnya mirip dengan indeks melek huruf, rumusnya sebagai berikut;

$$x_{2.2} = \frac{rls - 0}{15 - 0} \times 100$$

**Keterangan :**

$X_{2.2}$  = Indeks rata-rata lama sekolah

rls = rata-rata lama bersekolah

0 = angka melek huruf terendah

15 = angka melek huruf tertinggi

Sebelum perhitungan di atas, dalam pengolahan data susenas, pada keterangan pendidikan diperlukan skor/ konversi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang, sebagai berikut;

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Konversi (Tahun)
1. Tidak pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar	6
3. SLTP	9
4. SLTA/SMU	12
5. Diploma I	13
6. Diploma II	14
7. Akademi/Diploma III	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. Magister (S2)	18
10. Doktor (S3)	21

d) Indeks Daya Beli, “*Purchasing Power Parity*” (PPP) diharapkan sebagai proxy terhadap kehidupan layak bagi penduduk. Diberbagai negara menggunakan angka pendapatan per kapita sebagai proxy tersebut, akan tetapi di Indonesia belum dapat mempublikasikan angka pendapatan per kapita pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara berkala. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan data.

Data yang dapat dipublikasikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah pendapatan regional per kapita. Dimana kedua indikator tersebut sangat berbeda, dan perbedaan kedua indikator itu tidak dijelaskan dalam bahasan ini. Di Indonesia untuk memperoleh tingkat daya beli digunakan suatu paket komoditas yang terdiri dari 27 komoditas yang diperoleh dari Susenas pada keterangan Pengeluaran Rumah Tangga. Rumus Indeks Daya Beli (PPP) sebagai berikut;

$$X_3 = \frac{ppp^k - 360}{732.72 - 300} \times 100$$

**Keterangan :**

$X_3$  = Indeks daya beli

$ppp^k$  = paritas daya beli hasil koreksi (rumus: Atkinson)

360 = perkiraan ppp maksimum hingga tahun 2018

300 = perkiraan garis kemiskinan (metode baru)

732.72 = nilai maksimum ppp

Untuk memperoleh  $ppp^k$ , perhitungannya melalui beberapa tahap/ proses, sebagai berikut;

👉 **Persiapan data:**

1. Pengeluaran rumah tangga untuk 27 komoditas dalam volume (berat/ unit/ butir dsb) dan rupiah.
2. Indeks harga konsumen (IHK); adalah angka yang menggambarkan perubahan secara umum harga-harga pada waktu dan daerah tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu mencerminkan terjadi inflasi atau deflasi.

## 3. Jumlah penduduk.

## ☝ Proses Perhitungan :

1. Pengeluaran per kapita adalah jumlah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk ( $Y_1$ ).
2. Pengeluaran per kapita riil adalah pengeluaran per kapita dikalikan dengan angka IHK ( $Y_2$ ).
3. Menghitung PPP

$$PPP = \frac{\sum E(i, j)}{\sum P(i, j)Q(i, j)}$$

## Keterangan :

$E_{(i,j)}$  = pengeluaran untuk komoditi ke-j di kab/kota ke-i

$P_{(i,j)}$  = harga komoditi ke-j di Jakarta Selatan

$Q_{(i,j)}$  = volume komoditi ke-j (unit) yang dikonsumsi di kab/kota

**Catatan :** Bahwa harga standar untuk se Indonesia adalah Jakarta Selatan, yang berdasarkan 27 komoditi

4. Pengeluaran per kapita riil dibagi dengan ppp, untuk mendapatkan kekuatan daya beli per kabupaten/ kota berdasarkan paket komoditas, ( $Y_3$ ).
5. Kekuatan daya beli ( $Y_3$ ) perlu dilakukan penyesuaian dengan formula Atkinson :

$$\begin{aligned}
 ppp^k &= C(i) && \text{jika } C(i) \leq Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C(i) \leq 2Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} + 3(C(i) - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C(i) \leq 3Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} + 3(C(i) - 2Z)^{(1/3)} + 4(C(i) - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C(i) \leq 4Z \\
 &\text{dst.}
 \end{aligned}$$

## Keterangan :

$C_{(i)}$  = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

$Z$  = batas tingkat pengeluaran ditetapkan secara arbiter Rp 1 500 per kapita hari.

- e. *Reduksi Shortfall*, Mengukur keberhasilan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat.

$$shortfall = \left[ \frac{ipm^t - ipm^{t-1}}{100 - ipm^{t-1}} \times 100\% \right]^{1/n}$$

Keterangan :

Ipm = Indeks Pembangunan Manusia

t = tahun pada t (tahun terakhir/ sekarang)

t = tahun pada t-1 (tahun awal/ sebelumnya)

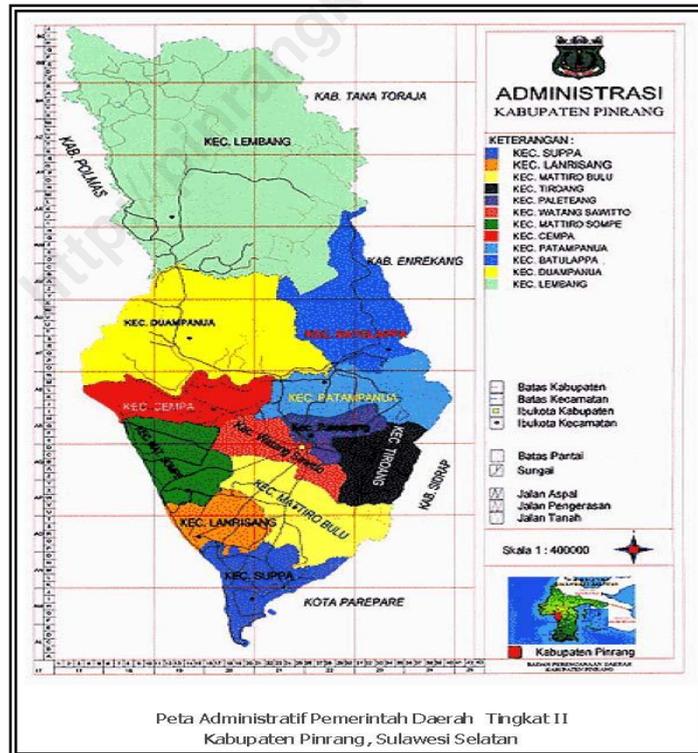
n = periode waktu pada t-1 dan t

100 = konstanta, pencapaian kondisi ideal ipm

## BAB III KONDISI WILAYAH

### 3.1. Geografis

Secara geografis Kabupaten Pinrang terletak:  $3^{\circ}9'13'' - 4^{\circ}10'30''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}26'30'' - 119^{\circ}47'20''$  Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Provinsi Sulawesi, Kota Makassar sekitar 182 kilometer ke arah Utara. Letak kabupaten ini berbatasan; di Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, di Timur dengan Enrekang dan Sidrap, Selatan dengan Kota Pare-Pare, dan Barat dengan Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mamasa dan Selat Makassar. Dan Luas wilayah daratan secara administrasi sekitar 1.961,77 kilometer persegi.



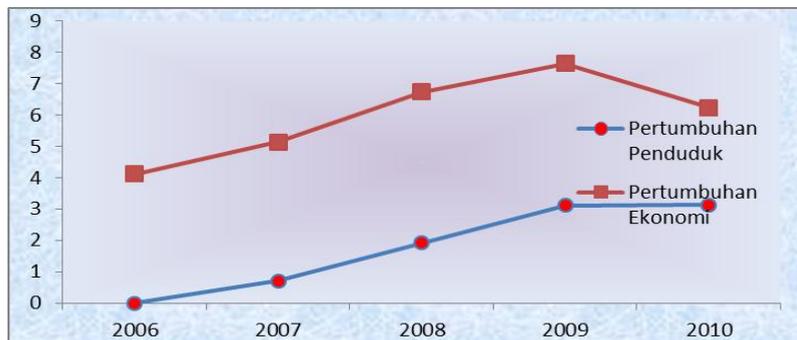
Ketinggian dari permukaan laut, terdapat 3 kecamatan yang berada di dataran tinggi yaitu Duampanua, Batulappa dan Lembang. Sedangkan kecamatan yang mempunyai beberapa desa berada pada ketinggian di atas 150 meter adalah Suppa, Mattirobulu, dan Paleteang. Kecamatan yang lain dapat dikategorikan dengan dataran rendah.

Jenis tanah pada umumnya adalah jenis tanah Aluvial kelabu kekuningan, Brown forest soil, Fodsolik coklat, dan Regosol kelabu. Jenis tanah tersebut tersebar di hamper semua daerah kecamatan di Kabupaten Pinrang.

### 3.2. Penduduk

Jumlah penduduk dalam periode lima tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 2,22 persen. Hal itu dapat dilihat pada pertengahan tahun 2006 terdapat 340.439 jiwa dan menjadi 351.118 jiwa pada pertengahan tahun 2010 (Sumber : DAU dan Sensus Penduduk).

Grafik. 3.1. Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010 (%)



Jumlah penduduk yang sebanyak itu tersebar pada 12 kecamatan terdiri dari 65 desa dan 39 kelurahan; dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi sekitar 179 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Paleteang dan Watangsawitto. Kecamatan Paleteang merupakan salah satu sentra perkebunan dan kehutanan, sedangkan Watangsawitto merupakan ibukota Kabupaten Pinrang.

### **3.3. Perekonomian**

Potensi ekonomi masih tertumpuh pada sektor Pertanian terutama sub sektor Tanaman bahan makanan dan Perikanan. Sektor Pertanian mempunyai peranan sekitar 55,32 persen dari total perekonomian (pada tahun 2010). Sektor kedua terbesar adalah Sektor Perdagangan terutama perdagangan retail, yakni sebesar 11,23 persen.

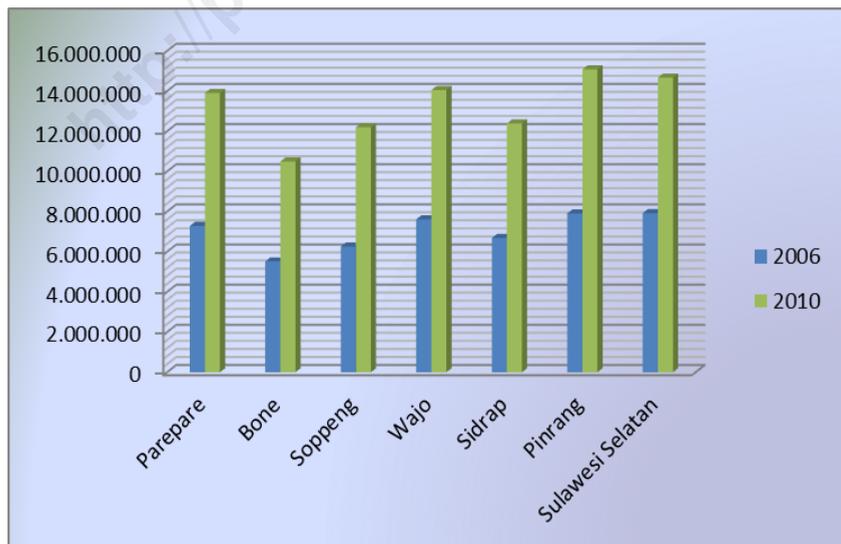
Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2010 sebesar 6,23 persen relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yang sebesar 7,65 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun periode tahun 2006 hingga 2010 tercatat sebesar 5,97 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar 5.290,8 milyar rupiah yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2006 yang sebesar 2.685,1 milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan, dalam tahun 2010

sebesar 2532,7 milyar rupiah dan 1.973,9 milyar rupiah pada tahun 2006.

Produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Pinrang pada tahun 2006 tercatat sekitar 7,9 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan pembangunan ekonomi, yang pada tahun 2010 menjadi 15,1 juta rupiah. Angka Produk domestik regional bruto per kapita tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan beberapa kabupaten terdekat seperti Kabupaten Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, Soppeng dan Kota Parepare. Dan bahkan angka PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang sekitar 14,7 juta rupiah.

Grafik. 3.2. Perbandingan PDRB Per Kapita Beberapa Kabupaten Pada tahun 2006 dan 2010 (dalam Rupiah)



Tabel. 3.1. Indikator Kependudukan dan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010

Jenis Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1 Penduduk</b>						
a Jumlah (Jiwa)	340.439	342.852	346.988	351.042	351.118	346.488
b Pertumbuhan (%)	xx	0,71	1,92	3,11	3,14	2,22
c Kepadatan/ km2	174	175	177	179	179	177
<b>2 Perekonomian</b>						
a Struktur (%)						
- Pertanian	60,05	59,30	57,88	56,50	55,32	57,81
- Perdagangan	11,02	11,19	11,50	11,76	11,23	11,34
- Lainnya	28,93	29,51	30,63	31,74	33,45	30,85
b PDRB (Milyar Rp)						
- Atas dasar harga berlaku	2.685,1	3.046,9	3.737,0	4.492,9	5.290,8	3.850,5
- Atas dasar harga konstan	1.973,9	2.075,2	2.214,9	2.384,3	2.532,7	2.236,2
c Pertumbuhan Ekonomi	4,12	5,14	6,73	7,65	6,23	5,97
d PDRB Per Kapita (Rp.000)	7.898,6	8.887,6	10.810,4	12.891,2	15.068,4	11.111,2
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang						

Tabel. 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas dasar Harga Berlaku Beberapa Daerah Sekitar Kabupaten Pinrang, 2006-2010 (dalam Rupiah)

Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Enrekang	5.246.524	6.118.661	7.210.200	8.557.801	10.099.496	7.446.536
Pare-Pare	7.281.147	8.564.557	10.315.544	11.900.669	13.899.449	10.392.273
Sidrap	6.677.777	7.463.412	9.057.342	10.949.482	12.381.995	9.306.002
<b>Pinrang</b>	<b>7.898.637</b>	<b>8.887.578</b>	<b>10.810.450</b>	<b>12.891.200</b>	<b>15.068.399</b>	<b>11.111.253</b>
Bone	5.512.953	6.262.916	7.540.910	8.985.077	10.492.627	7.758.897
Soppeng	6.252.794	7.129.950	8.718.841	10.360.170	12.189.646	8.930.280
Wajo	7.609.132	8.564.615	10.257.960	12.148.525	14.046.563	10.525.359
<b>Sulse!</b>	<b>7.920.519</b>	<b>8.907.258</b>	<b>10.825.425</b>	<b>12.567.364</b>	<b>14.665.035</b>	<b>10.977.120</b>
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang						

## **BAB IV**

### **KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA**

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu modal untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, atau pun indikator-indikator lain. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia, akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal ini kinerja ekonominya. Dengan kata lain, bahwa peningkatan kualitas modal manusia akan sekaligus memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

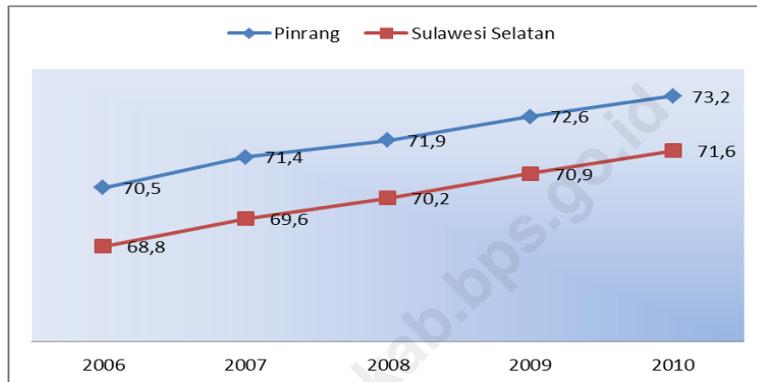
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah/wilayah. Jarak yang harus ditempuh—*shortfall*—suatu wilayah mempunyai nilai maksimum 100. Artinya jika suatu wilayah telah mencapai angka 100 maka pembangunan manusia secara keseluruhan telah tercapai. Jadi suatu wilayah yang mempunyai angka IPM yang masih rendah atau masih jauh dari angka 100, artinya jarak yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari pembangunan manusia dapat dikatakan masih jauh. Dan tentunya hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua daerah/ wilayah/ Negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penggerak utama harus mengupayakan pemberdayaan manusia sehingga dapat memperpendek jarak ke tujuan.

#### **4.1. Shortfall Pembangunan Manusia**

Hasil yang diperoleh, pada tahun 2006 indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang sebesar 70,5 dan pada tahun 2007, angka tersebut meningkat menjadi 71,4. Kinerja pembangunan manusia tersebut pada tahun 2008, menjadi 71,9 hingga pada tahun 2009, indeksnya telah mencapai 72,6. Dan pada tahun 2010 angkanya meningkat menjadi 73,2. Selama periode tahun 2006 hingga 2010, angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,52 (reduksi *short fall*). Fakta ini memberikan petunjuk bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang meningkat cukup drastis, yang termasuk kabupaten dengan peningkatan IPM tercepat di Sulawesi

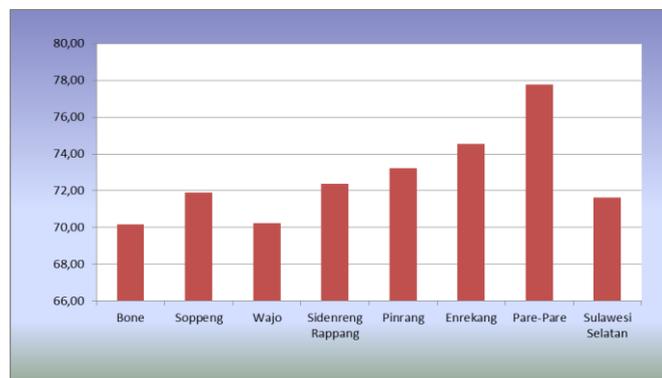
Selatan. Dan suatu hal lagi yang menarik bahwa selain angka IPM Kabupaten Pinrang yang berada di atas angka provinsi juga perbedaan kecepatan perubahan yang semakin melebar.

Grafik 4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010



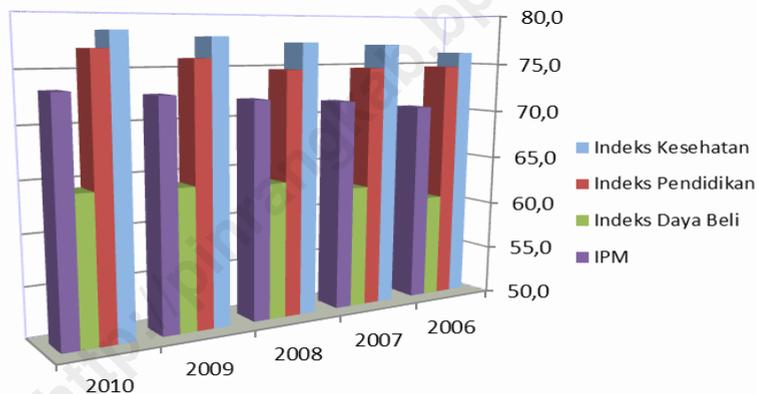
Perbandingan dengan beberapa kabupaten yang terletak atau berdekatan dengan Kabupaten Pinrang, seperti, Kabuapten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap; maka pola kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang secara umum lebih mendorong meningkatnya pembangunan manusia.

Grafik 4.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Sekitarnya (Persentase) Tahun 2010



Fakta tersebut di atas merupakan cerminan meningkatnya angka indeks pada tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran kinerja pembangunan manusia. Untuk jelasnya, akan diuraikan masing-masing komponen tersebut, yaitu pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang ekonomi atau daya beli. Namun sebelumnya bahwa dari ketiga komponen tersebut, indeks daya beli merupakan indeks yang terendah, Grafik.4.3.

Grafik 4.3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Menurut Komponennya Tahun 2006-2010 (Persentase)



## 4.2. Bidang Kesehatan

Tercapainya tujuan pembangunan dibidang kesehatan berupa derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan adanya; kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk; terselektifnya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya-upaya dibidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam usaha mencapai tujuan tersebut di atas, telah melakukan beberapa program seperti program pemerataan kesehatan, peningkatan status gizi, dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal ini adalah indeks harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka tersebut diharapkan dapat mencerminkan tingkat/ derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang derajat kesehatannya buruk.

a) Indeks Kesehatan

Seperti telah diuraikan dalam metodologi, bahwa indeks kesehatan merupakan angka harapan hidup yang memperhatikan standar yang direkomendasikan oleh UNDP. Dimana angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian bayi.

Berdasarkan hasil perhitungan di Kabupaten Pinrang, selama periode 2006-2010 angka indeks tersebut memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Rata-rata peningkatan per tahun (*reduction short fall*) sebesar 0,24 persen, yaitu dari 76,2 menjadi 78,4.

b) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup telah mengalami peningkatan dari 70,70 tahun pada 2006 menjadi 72,06 tahun pada 2010. Angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 70,00 tahun pada keadaan 2010. Angka harapan hidup Kabupaten Pinrang meningkat rata-rata per tahun 0,34 tahun.

c) Fasilitas Kesehatan

Sebagai gambaran umum keadaan fasilitas kesehatan dalam uraian berikut akan digunakan rasio sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas, termasuk puskesmas pembantu dan keliling) dan tenaga medis (dokter, bidan dan perawat/ paramedis) terhadap 10 ribu penduduk sebagai indikator. Keadaan tahun 2006 hingga 2010 bidang kesehatan cenderung belum mengalami perubahan, yaitu sebesar 2,3. Artinya dalam 10 ribu penduduk terdapat 2,3 fasilitas kesehatan atau setiap fasilitas kesehatan tersebut di atas untuk 5.209 penduduk. Sedangkan ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis selama periode yang sama juga belum mengalami perubahan yang mencolok.

### **4.3. Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan, dan juga sebagai salah satu pilar utama agar penduduk dapat memper-dayakan dirinya berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendidikan disini tidak diartikan hanya pendidikan formal saja, akan tetapi dalam arti lebih luas, termasuk pendidikan berpolitik. Pendidikan politik tidak mesti diisolasi dari yang lainnya, akan tetapi menjadi salah satu unsur pendidikan yang penting agar penduduk dapat secara partisipatif menentukan serta menikmati hasil pembangunan. Namun disadari, indikator dasar tentang pendidikan politik sampai saat ini belum tersedia.

### 4.3.1 Indeks Pendidikan

Perhitungan angka indeks ini terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua unsur tersebut akan dijelaskan kemudian.

Tabel 4.1. Indeks Pendidikan Beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 (Persentase)

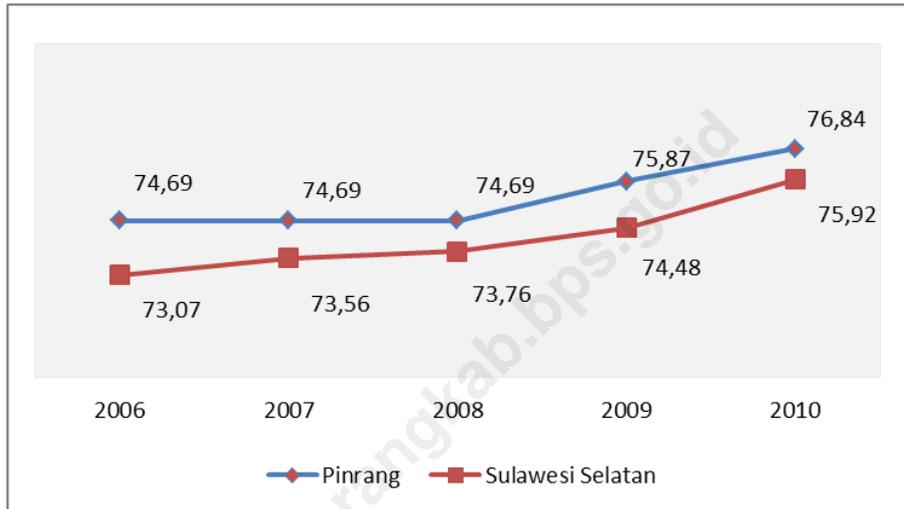
Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
1 Bone	70,32	70,32	70,32	70,74	71,46
2 Soppeng	70,24	71,60	71,61	72,23	73,90
3 Wajo	66,30	67,34	67,54	68,59	69,51
4 Sidrap	73,73	75,68	75,68	75,80	75,85
<b>5 Pinrang</b>	<b>74,69</b>	<b>74,69</b>	<b>74,69</b>	<b>75,87</b>	<b>76,84</b>
6 Enrekang	73,40	77,93	77,93	78,63	78,74
7 Luwu	78,09	78,09	78,09	78,12	78,20
<b>8 Sulawesi Selatan</b>	<b>73,07</b>	<b>73,56</b>	<b>73,76</b>	<b>74,48</b>	<b>75,92</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Kedua tahun 2010, kondisi pendidikan Kabupaten Pinrang memperlihatkan peningkatan dari empat tahun sebelumnya, yakni sebesar 76,8. Dan apabila angka tersebut dibandingkan angka

Provinsi Sulawesi Selatan maka indeks pendidikan Kabupaten Pinrang relatif lebih tinggi, (Sulsel 75,9 tahun 2010).

Grafik 4.4. Indeks Pendidikan Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 (Persentase)



#### 4.3.2 Angka Melek Huruf

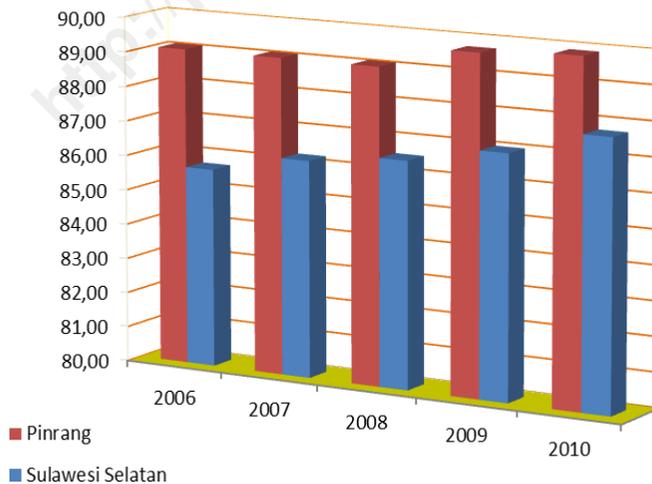
Jumlah angka melek huruf dihitung berdasarkan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Dalam periode 2006-2010, di Kabupaten Pinrang memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang dapat membaca dan menulis rata-ratanya sebesar 89,39 persen. Apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, maka angka melek huruf Kabupaten Pinrang relatif masih lebih baik (Kabupaten Pinrang : 89,90 dan Provinsi Sulawesi Selatan : 87,75 persen).

Tabel 4.2. Angka Melek Huruf Beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 (Persentase)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
1 Bone	84,78	84,78	84,78	84,85	84,86
2 Soppeng	83,56	84,59	84,59	85,08	86,67
3 Wajo	80,11	81,68	81,97	82,69	83,53
4 Sidrap	86,60	89,52	89,52	89,57	89,63
<b>5 Pinrang</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,74</b>	<b>89,90</b>
6 Enrekang	85,27	89,76	89,76	90,44	90,44
7 Luwu	91,47	91,47	91,47	91,48	91,48
<b>8 Sulawesi Selatan</b>	<b>85,70</b>	<b>86,24</b>	<b>86,53</b>	<b>87,02</b>	<b>87,75</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Grafik 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 (Persentase)



### **4.3.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Angka ini sangat berguna untuk memonitor tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.

Di Kabupaten Pinrang, keadaan lama bersekolah penduduk tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 2006. Namun demikian, angka rata-rata lama sekolah mengalami sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tersebut digambarkan oleh rata-rata lama bersekolah pada tahun 2010, yakni sebesar 7,6 tahun. Dengan kata lain pada tahun 2010, bahwa setiap penduduk mempunyai jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang sedang duduk di kelas 2. Angka ini masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan angka provinsi yang sebesar 7,8 tahun pada 2010.

### **4.3.4. Fasilitas Pendidikan**

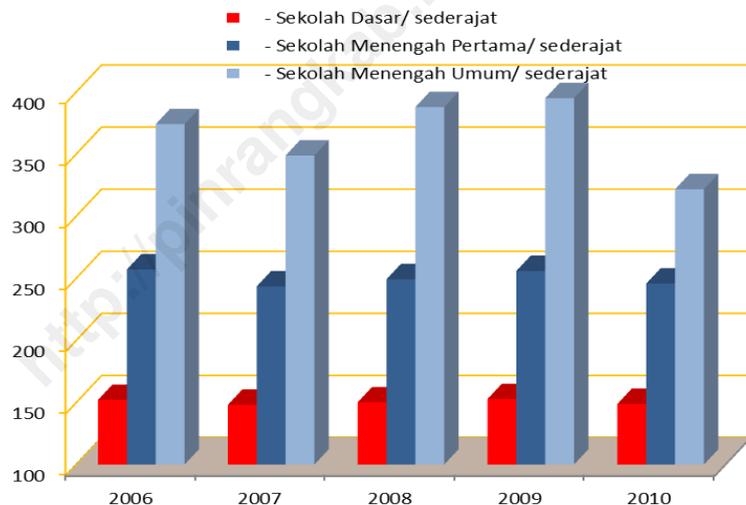


Fasilitas ini merupakan suatu syarat hampir mutlak yang harus tersedia. Ketersediaan fasilitas tersebut dapat berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, ruang kelas, laboratorium, ruang komputer dan perpustakaan serta ruang serba guna. Dalam bahasan ini akan digunakan indikator daya tampung sekolah (rasio murid terhadap

sekolah) dan beban kerja seorang tenaga pengajar (rasio murid terhadap tenaga pengajar).

Daya tampung sekolah menurut jenjang pendidikan memperlihatkan bahwa pada sekolah dasar perbandingan jumlah murid per sekolah relatif sama selama periode 2006-2010. Pada tahun 2006 setiap sekolah mempunyai daya tampung 152 murid dan sedikit agak menurun pada tahun 2010 yang sekitar 149 murid.

Grafik 4.6. Daya Tampung Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010 (murid)



Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama memperlihatkan kecenderungan yang menurun dengan keadaan pada sekolah dasar, yakni 257 murid pada tahun 2006 menjadi 246 pada tahun 2010. Pada jenjang pendidikan ataspun menunjukkan kecenderungan angka yang menurun, yaitu 374

murid pada tahun 2006 menurun menjadi 322 pada tahun 2010. Jika kita perhatikan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula daya tampungnya.

Beban kerja tenaga pengajar/ atau perbandingan antara jumlah murid terhadap guru; di sekolah dasar pada tahun 2006 sebesar 19 orang dan menjadi 20 orang murid per guru tahun 2010. Pada Sekolah menengah pertama keadaannya cenderung mirip dengan yang terjadi di sekolah dasar, yakni pada tahun 2006 sebesar 14 orang menjadi 7 orang pada tahun 2010. Untuk jenjang sekolah menengah atas keadaannya cenderung tetap. Secara umum dapat diartikan bahwa perbandingan tersebut semakin mengecil, yang dapat diinterpretasikan sebagai membaiknya keadaan pendidikan secara umum.

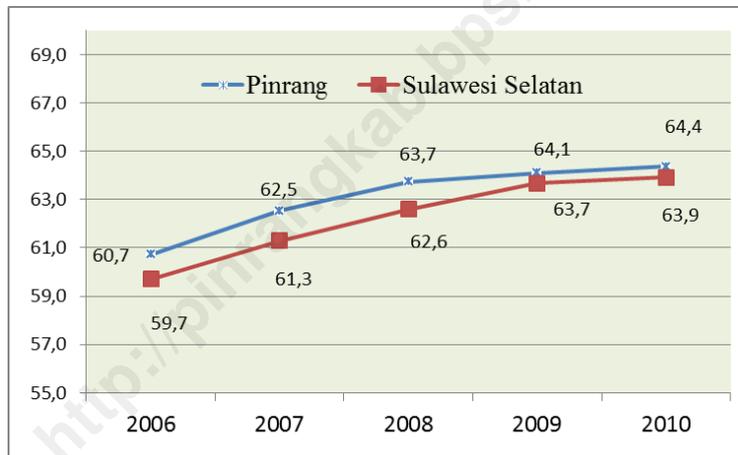
#### **4.3.5. Bidang Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi telah memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin membaik, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto per kapita, paritas daya beli dan dampak terhadap adanya perbaikan ekonomi. Dampak tersebut dapat dicerminkan oleh beberapa informasi pendukung seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan konsumsi rumah tangga. Dalam bahasan berikut tidak dikemukakan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional per kapita, karena hal tersebut telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

#### 4.4. Indeks Daya Beli

Seperti telah dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa indeks daya beli merupakan gambaran kemampuan ekonomi penduduk. Kemampuan ini diperoleh dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik konsumsi makanan maupun non makanan, untuk lebih jelasnya baca bab pendahuluan.

Grafik 4.7 Indeks Paritas Daya Beli Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2010 (%)



Pada keadaan 2006 paritas daya beli penduduk Kabupaten Pinrang sebesar Rp.622.8 ribu dan meningkat menjadi Rp.638,5 ribu pada tahun 2010. Keadaan itu, menghasilkan nilai indeks daya beli pada tahun 2006 sebesar 60,7 dan meningkat di tahun 2010 menjadi 64,4 persen. Dalam kurun waktu tersebut peringkat indeks daya beli telah mengalami lompatan yang sangat berarti. Dengan kata lain, kenaikan paritas daya beli Kabupaten Pinrang termasuk daerah yang

mempunyai peningkatan yang terbesar apabila dibandingkan dengan kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan nilai *shortfall* yang sebesar 1,96 persen.

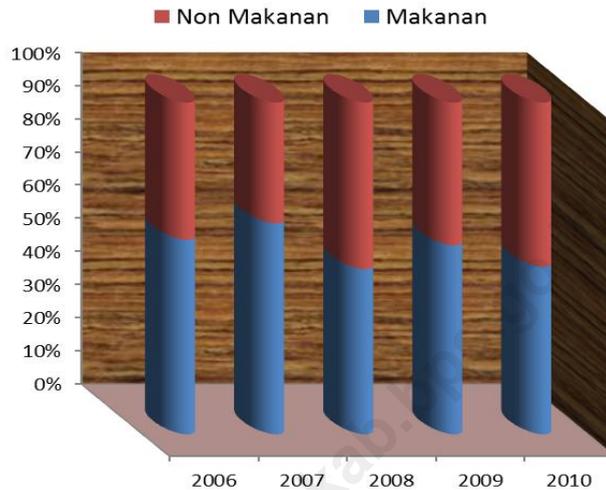
Indeks daya beli baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten/ kota merupakan komponen yang terendah apabila dibandingkan dengan dua komponen lainnya. Pada tahun 2010, angka indeks daya beli Kabupaten Pinrang jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang terdekat/ sekitarnya termasuk tertinggi, demikian pula dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **4.5. Pengeluaran Rumah Tangga**

Selama kurun waktu yang sama di atas, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan, memperlihatkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan oleh hasil survei sosial ekonomi nasional pada keadaan tahun 2006 sebesar 992.4 ribu rupiah per rumah tangga sebulan dan meningkat menjadi 1.689.1 ribu rupiah pada tahun 2010. Dalam periode tersebut telah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 17,55 persen.

Perbandingan antara konsumsi makanan dan non makanan dalam kurun yang sama memperlihatkan persentase yang relatif sama. Secara rata-rata persentase konsumsi makanan mempunyai porsi yang relatif besar, fenomena ini terjadi bukan saja di Pinrang akan tetapi di Indonesia.

Grafik.4.8. Perbandingan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010 (%)



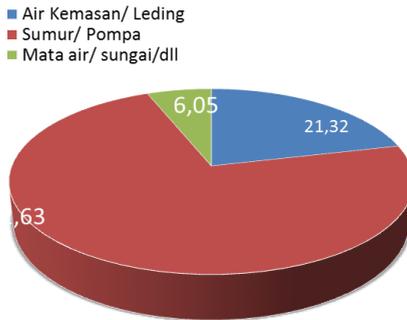
#### 4.6. Fasilitas Perumahan

Salah satu cerminan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga adalah tersedianya fasilitas air bersih dan penggunaan penerangan yang bersumber dari listrik. Berdasarkan penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2004 bahwa terdapat dua variabel yang sangat signifikan yaitu variabel lama bersekolah dan air bersih yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan. Seperti diketahui bahwa ketersediaan air bersih merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi penduduk. Dengan ketidaktersediaan akan air bersih menjadi sumber penyakit misalnya desentri dan kolera.

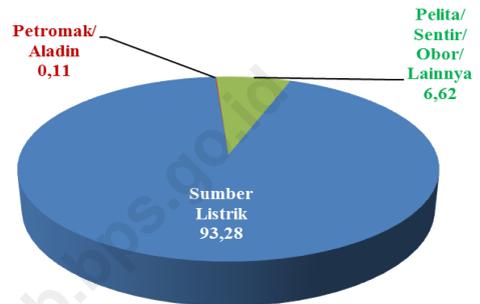
Di Kabupaten Pinrang, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (bersumber dari air kemasan dan air leding)

selama periode yang sama sekitar 21,32 persen dari total rumah tangga. Atau dengan kata lain, terdapat 2 dari 10 rumah tangga yang mempunyai fasilitas air bersih.

Grafik.4.9. Sumber Air Bersih Pinrang Tahun 2010 (%)



Grafik.4.10. Sumber Penerangan Listrik Pinrang Tahun 2010 (%)



Fasilitas penerangan listrik dianggap dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, karena berpengaruh terhadap rata-rata lama belajar atau membaca bahkan akses terhadap media massa. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas penerangan dari listrik dalam kurun waktu 2006-2010 rata-ratanya sebesar 92,39 %.

**Tabel 4.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Terdekat**  
**Tahun 2006-2010 (%)**

Kabupaten/ Kota (terdekat)	2006			2007			2008			2009			2010			Shortfall 06-10 (%)
	IPM	Shortfall 05-06 (%)	Rank	IPM	Shortfall 06-07 (%)	Rank	IPM	Shortfall 07-08 (%)	Rank	IPM	Shortfall 08-09 (%)	Rank	IPM	Shortfall 09-10 (%)	Rank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 Bone	67,82	0,76	15	68,34	0,25	16	68,96	0,30	16	69,63	0,32	16	70,17	0,26	17	1,94
2 Soppeng	69,33	0,15	11	70,26	0,44	10	70,76	0,24	11	71,26	0,24	11	71,89	0,30	10	2,03
3 Wajo	66,79	0,17	20	68,04	0,62	19	68,72	0,33	19	69,44	0,35	19	70,22	0,37	16	2,18
4 Sidenreng Rappang	69,99	0,33	9	71,18	0,57	9	71,74	0,26	8	72,06	0,15	8	72,37	0,14	9	1,99
<b>5 Pinrang</b>	<b>70,53</b>	<b>0,09</b>	<b>8</b>	<b>71,43</b>	<b>0,43</b>	<b>8</b>	<b>71,91</b>	<b>0,22</b>	<b>7</b>	<b>72,61</b>	<b>0,33</b>	<b>7</b>	<b>73,21</b>	<b>0,27</b>	<b>7</b>	<b>2,09</b>
6 Enrekang	71,38	0,48	6	73,32	0,90	4	73,76	0,20	4	74,42	0,30	4	74,55	0,06	4	2,23
7 Pare-Pare	75,53	0,38	2	76,47	0,41	2	76,97	0,22	2	77,45	0,21	2	77,78	0,14	2	2,09
<b>8 Sulawesi Selatan</b>	<b>68,81</b>	<b>0,32</b>	<b>xx</b>	<b>69,62</b>	<b>0,39</b>	<b>xx</b>	<b>70,22</b>	<b>0,29</b>	<b>xx</b>	<b>70,94</b>	<b>0,34</b>	<b>xx</b>	<b>71,62</b>	<b>0,32</b>	<b>xx</b>	<b>2,08</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

$$\text{Rumus Perubahan (shortfall)} = \left\{ \frac{ipm_n - ipm_{n-1}}{100 - ipm_{2n-1}} \right\} \times 100$$

**Tabel 4.4**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Menurut Komponennya Tahun**  
**2006-2010 (%)**

Indikator/ Komponen	2006	2007	2008	2009	2010	Perubahan 2006-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1 Kesehatan</b>						
a. Angka Harapan Hidup	70,70	71,23	71,38	71,72	72,06	0,64
b. Indeks Kesehatan	76,2	77,1	77,3	77,9	78,4	0,98
<b>2 Pendidikan</b>						
a. Angka Melek Huruf	89,10	89,10	89,10	89,74	89,90	0,30
b. Rata-rata Lama Sekolah	6,9	6,9	6,9	7,2	7,6	3,42
c. Indeks Pendidikan	74,7	74,7	74,7	75,9	76,8	0,95
<b>3 Hidup Layak</b>						
a. Paritas Daya Beli	622,8	630,6	635,8	637,4	638,5	0,84
b. Indeks Daya Beli	60,7	62,5	63,7	64,1	64,4	1,96
<b>IPM</b>	<b>70,5</b>	<b>71,4</b>	<b>71,9</b>	<b>72,6</b>	<b>73,2</b>	<b>1,25</b>

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Tabel. 4.5  
Indikator Pendukung Menurut Jenis Indikator Kabupaten Pinrang  
Tahun 2006-2010 (%)

Jenis Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Bidang Kesehatan</b>						
a. Rasio Fasilitas terhadap 10 ribu penduduk	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
b. Rasio Tenaga Medis terhadap 10 ribu penduduk	9,8	12,1	11,7	8,9	11,1	10,7
c. Rasio Dokter terhadap Fasilitas	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
<b>2. Bidang Pendidikan (Depdikbud)</b>						
a. Rasio murid terhadap sekolah						
- Sekolah Dasar/ sederajat	152	148	150	153	149	150
- Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	257	243	249	256	246	250
- Sekolah Menengah Umum/ sederajat	374	349	388	395	322	365
b. Rasio murid terhadap Guru						
- Sekolah Dasar/ sederajat	19	14	14	14	20	16
- Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	14	12	13	12	7	12
- Sekolah Menengah Umum/ sederajat	12	16	22	17	12	16
<b>3. Fasilitas Perumahan Penduduk</b>						
a. Rumah Tangga menggunakan Listrik (%)	89,74	94,58	88,07	96,27	93,28	92,39
b. Rumah Tangga menggunakan Air Bersih (%)	10,65	9,80	8,18	11,81	21,32	12,35
c. Pengeluaran Rumah Tangga/bulan (Rp.000)	992,4	1.014,5	1.566,0	1.737,7	1.689,1	1.399,9
- Konsumsi Makanan (Rp.000)	581,7	645,2	779,6	989,6	853,9	770,0
- Konsumsi Bukan Makanan (Rp.000)	410,7	369,4	786,4	748,1	835,2	629,9
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang						

Tabel. 4.6  
PDRB Per Kapita Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2006-2010

Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Enrekang	5.246.524	6.118.661	7.210.200	8.557.801	10.099.496	7.446.536
Pare-Pare	7.281.147	8.564.557	10.315.544	11.900.669	13.899.449	10.392.273
Sidrap	6.677.777	7.463.412	9.057.342	10.949.482	12.381.995	9.306.002
<b>Pinrang</b>	<b>7.898.637</b>	<b>8.887.578</b>	<b>10.810.450</b>	<b>12.891.200</b>	<b>15.068.399</b>	<b>11.111.253</b>
Bone	5.512.953	6.262.916	7.540.910	8.985.077	10.492.627	7.758.897
Soppeng	6.252.794	7.129.950	8.718.841	10.360.170	12.189.646	8.930.280
Wajo	7.609.132	8.564.615	10.257.960	12.148.525	14.046.563	10.525.359
<b>Sulsel</b>	<b>7.920.519</b>	<b>8.907.258</b>	<b>10.825.425</b>	<b>12.567.364</b>	<b>14.665.035</b>	<b>10.977.120</b>
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang						

## **BAB V**

### **TENAGA KERJA**

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi pekerjaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari – hari, aspek sosial terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan/ eksistensi atas kemampuan dari individu, baik pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan dalam berusaha di semua sektor ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan itu sendiri.

Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja.

#### **5.1. Angkatan Kerja**

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas baik yang terdiri dari mereka yang melakukan kegiatan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tahun 2010, dari 237.973 penduduk usia kerja terdapat 140.074 angkatan kerja, dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 97.899 orang. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama periode 2006 hingga 2010;

TPAK cenderung berfluktuasi, hal itu tercermin dari nilainya pada 2006 yang sebesar 51,61 persen ; Tahun 2008 meningkat menjadi 61,28 persen dan menjadi 58,86 persen pada tahun 2010.

Tabel 5.1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2010

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	127.461	141.325	149.411	149.148	140.074
Bukan Angkatan Kerja	101.732	96.964	94.419	98.727	97.899
Total	229.193	238.289	243.830	247.875	237.973
TPAK (%)	55,61	59,31	61,28	60,17	58,86
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang					

## 5.2. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja usia 15 tahun ke atas yang sedang aktif mencari pekerjaan. Ketidakseimbangan antara permintaan akan lapangan kerja yang semakin meningkat dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas, merupakan masalah utama dalam pengangguran. Tingkat pengangguran (terbuka) penduduk Kabupaten Pinrang sekitar 7,79 persen pada tahun 2010. Angka tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 2006 yang sebesar 11,83 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Pinrang relatif lebih tinggi daripada tingkat pengangguran Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pinrang tersebut apabila dirinci menurut pendidikannya maka mereka yang berpendidikan rendah masih sangat besar.

### 5.3. Pendidikan Angkatan Kerja

Kualitas Pekerja dapat dicerminkan dari tingkat pendidikannya, pekerja yang berpendidikan tinggi diharapkan tingkat produktifitasnya akan lebih baik. Rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Pinrang berpendidikan rendah terlihat dari persentase pekerja yang tamat sekolah dasar ke bawah sebesar 51 persen, sedangkan yang berpendidikan yang pendidikan tinggi (Diploma/ Universitas) persentasenya sekitar 10 persen. Besarnya persentase jumlah pekerja yang berpendidikan rendah secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas pekerja.

Tabel 5.2 Perbandingan Struktur Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Uraian		Pinrang		Sul-Sel	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan Kerja				
a.	Bekerja	129.156	92,21	3.272.265	91,63
b.	Mencari Kerja	10.918	7,79	298.952	8,37
c.	Jmlah Angkatan kerja	140.074	100,00	3.571.217	100,00
2	Bukan Angkatan Kerja				
a.	Sekolah	3.765	3,85	414.063	20,74
b.	Mengurus RT	69.388	70,88	1.210.068	60,62
c.	Lainnya	24.746	25,28	372.153	18,64
d.	Jumlah Bukan Angk Kerja	97.899	100,00	1.996.284	100,00
3	Total	237.973	xx	5.567.501	xx
4	TPT		7,79		8,37
5	TPAK		58,86		64,14

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

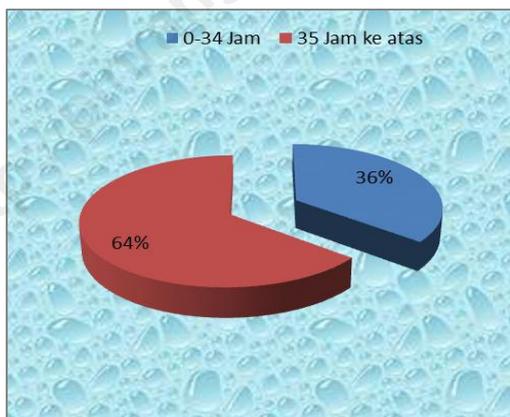
### 5.4. Produktifitas Pekerja

Besarnya persentasenya jumlah pekerja yang berpendidikan rendah secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas

pekerjanya. Selain itu jam kerja pekerja per minggu dapat digunakan sebagai ukuran produktifitas pekerja suatu wilayah. Semakin banyak pekerja yang mempunyai jam kerja penuh maka semakin tinggi produktifitasnya.

Rendahnya produktifitas pekerja dapat dicerminkan oleh mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kelompok pekerja ini biasa disebut dengan pengangguran terselubung, pada tahun 2010 persentasenya telah mencapai 35,77 persen dari total pekerja. Artinya jika terdapat 100 pekerja maka yang setengah pengangguran/ terselubung sebanyak 36 pekerja.

Grafik 5.1 Penduduk yang Bekerja dalam Seminggu Kabupaten Pinrang Tahun 2010 (Persen)



Tabel 5.3 Penduduk yang Bekerja dalam Seminggu Kabupaten Pinrang Tahun 2010 (Persen)

Jam Kerja	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-34 Jam	41,18	51,84	52,32	44,78	35,77
35 Jam ke atas	58,82	48,16	47,68	55,22	64,23
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang tahun 2010 sebesar 73,2 dan shortfallnya sebesar 2,09 selama periode 2006-2010.
2. Komponen indeks pembangunan manusia tahun 2010, indeks kesehatan sebesar 78,4; indeks pendidikan 76,8 dan indeks daya beli 64,4 persen.
3. Dari ketiga komponen indeks pembangunan manusia di atas, angka indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli indeksinya masih relatif rendah.
4. Selama periode 2006 hingga 2010 indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang telah mengalami peningkatan. Hal itu dicerminkan oleh peningkatan per tahun sebesar 0,31 persen.
5. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2010 sebesar 6,23 persen.
6. Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku sekitar 15,1 juta rupiah pada tahun 2010, angka tersebut relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan tahun 2006 yang sebesar 7,9 juta rupiah.
7. Pengeluaran rumah tangga sebulan untuk konsumsi baik makanan maupun bukan makanan sekitar 1.689,1 ribu rupiah pada tahun 2010.
8. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sekitar 93,28 persen dan yang menggunakan air kemasan dan ledeng sebagai sumber air minum sekitar 21,32 persen pada tahun 2010.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan beberapa hasil temuan di atas, disarankan beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan program di bidang pendidikan harus terus diupayakan, antara lain melalui pendidikan dan kesehatan gratis, megingat daerah lain juga sedang menggalakkan program tersebut. Pengentasan buta huruf yang telah dilakukan harus terus diprogramkan, karena para penduduk yang telah mengikuti program tersebut berpotensi untuk buta huruf kembali. Kegiatan itu merupakan keterampilan sehingga harus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat masih dibutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih luas, peningkatan status gizi masyarakat terutama bagi bayi dan anak balita serta ibu hamil/menyusui. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih luas berkaitan dengan ketersediaan dan pemerataan sarana/ fasilitas kesehatan. Peningkatan daya tampung fasilitas kesehatan menjadi suatu hal yang penting karena akan memperluas akses kesehatan. Banyaknya jumlah tenaga medis pun menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kesehatan di suatu daerah. Peningkatan status gizi masyarakat juga tidak kalah pentingnya, diharapkan adanya program-program kesehatan yang terpadu dari pemerintah untuk bisa lebih lebih meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Pinrang .

3. Upaya peningkatan daya beli masyarakat berkaitan dengan perluasan lapangan pekerjaan. Perluasan lapangan pekerjaan akan berhubungan dengan potensi dan daya saing daerah. Potensi daerah Kabupaten Pinrang bertumpu pada sektor pertanian, terutama subsektor tanaman bahan makanan dan perikanan. Dimana sektor ini merupakan sangat berorientasi kepada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sehingga berpotensi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sub sektor perikanan terutama untuk komoditi rumput laut dan penangkapan ikan di laut mempunyai daya saing yang baik di antara kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan. Dalam rangka mendukung potensi dan daya saing diharapkan kepada pemerintah daerah berusaha bermitra dengan para investor menyediakan industri pengolahan untuk dua komoditi tersebut.